



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu menyusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
6. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian atau penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
7. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip dinamis.
8. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan arsip dinamis.

9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus guna pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM maupun pelaksanaan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
10. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sistem pengelolaan klasifikasi dan jenis arsip, klasifikasi keamanan arsip dinamis, dan klasifikasi akses arsip dinamis di Komnas HAM.
11. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.
13. Biasa atau Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara atau ketertiban umum yang akan menimbulkan kerugian terhadap kerahasiaan, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
15. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan

menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

17. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Komnas HAM.

#### Pasal 2

Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis merupakan pedoman dalam penggunaan dan pengamanan arsip dinamis di lingkungan Komnas HAM.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komnas HAM mencakup:

- a. klasifikasi arsip;
- b. jenis arsip;
- c. klasifikasi keamanan arsip;
- d. hak akses;
- e. dasar pertimbangan; dan
- f. unit pengolah.

#### Pasal 4

- (1) Arsip yang tercipta di Komnas HAM dapat diklasifikasikan menjadi informasi:
  - a. biasa atau terbuka;
  - b. terbatas;
  - c. rahasia; dan
  - d. sangat rahasia;
- (2) Tingkat klasifikasi informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan tingkat keamanan dan hak akses terhadap arsip.
- (3) Arsip dinamis Komnas HAM yang masuk kategori arsip biasa atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Komnas HAM apabila diketahui oleh masyarakat umum.

- (4) Arsip dinamis Komnas HAM yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis Komnas HAM apabila diketahui oleh masyarakat umum.
- (5) Arsip dinamis Komnas HAM yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Komnas HAM apabila diketahui oleh masyarakat umum.
- (6) Arsip dinamis Komnas HAM yang termasuk ke dalam kategori arsip sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung dampak yang luas hingga mengganggu keamanan dan keselamatan negara apabila diketahui oleh masyarakat umum.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Komnas HAM dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
- (2) Publik hanya dapat mengakses data dan/atau informasi yang dikategorikan biasa atau terbuka
- (3) Hak akses data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

#### Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komnas HAM disimpan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak arsip (*filig cabinet*) untuk menyimpan arsip biasa atau terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;

- b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (4) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas pengamanan.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM

#### Pasal 8

Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komnas HAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD TAUFAN DAMANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1726

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,



Henry Silka Innah



LAMPIRAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS (SKKAAD)**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>FASILITATIF</b>							
<b>I</b>	<b>PR</b>	<b>PERENCANAAN</b>					
<b>1</b>	<b>PR.00</b>	<b>Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan</b>					
	PR.00.01	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	PR.00.02	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	PR.00.03	c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	PR.00.04	d. Rencana Strategis (Renstra) - Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM - Rencana Strategis (Renstra) Setjen Komnas HAM (Eselon I) - Rencana Strategis (Renstra) Biro	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>PR.01</b> PR.01.00	<b>Rencana Kerja</b> a. Usulan Unit Kerja - Usulan Kegiatan dari unit kerja - Data dukung : Kerangka Acuan Kegiatan, Rincian Anggaran Belanja, dan Matriks Pendanaan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	PR.01.01	b. Penelaahan Usulan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	PR.01.02	c. Rencana Kinerja Tahunan - Rencana Kerja Tahunan (RKT) Komnas HAM - Rencana Kerja Tahunan (RKT) Setjen Komnas HAM (Eselon I) - Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
3	<b>PR.02</b> PR.02.00	<b>Perencanaan Anggaran</b> a. Pagu Indikatif - Surat Edaran Bersama (SEB) - Surat Pembahasan Pengalokasian Anggaran Pagu Indikatif - TOR dan RAB dari unit kerja - Formulir Pagu Indikatif - Dokumen <i>Trilateral Meeting</i>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.02.01	b. Pagu Anggaran - Surat Edaran Bersama (SEB) - Surat Pembahasan Pengalokasian Anggaran Pagu Anggaran  - TOR dan RAB dari unit kerja - Formulir Pagu Anggaran - Dokumen <i>Trilateral Meeting</i> - Surat Pengantar Pagu Anggaran - Rencana Kerja Anggaran - Formulir 1, 2, dan 3 - Daftar Pagu Anggaran masing-masing Satker - Lembar Persetujuan Komisi III DPR - Catatan Penelaahan Pagu Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PR.02.02	c. Pagu Alokasi Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Edaran Bersama (SEB)</li> <li>- Surat Pembahasan Pengalokasian Anggaran Pagu alokasi Anggaran</li> <li>- TOR dan RAB dari unit kerja</li> <li>- Formulir Pagu Alokasi Anggaran</li> <li>- Surat Pengantar Pagu Alokasi Anggaran</li> <li>- Rencana Kerja Anggaran</li> <li>- Formulir 1, 2, dan 3</li> <li>- Daftar Pagu Alokasi Anggaran Per Satker</li> <li>- Lembar Persetujuan Komisi III DPR</li> <li>- Catatan Penelaahan Pagu Anggaran</li> <li>- Catatan Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran</li> <li>- Dokumen KRISNA</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.02.03	d. Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang (SHSPB)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.02.04	e. Standar Biaya Khusus (SBK)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
<b>4</b>	<b>PR.03</b> PR.03.00	<b>Revisi Anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA dan POK                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Usulan Revisi Anggaran</li> <li>- Matriks Perubahan RKA dari unit kerja</li> <li>- TOR Perubahan</li> <li>- Surat Pengantar Usulan Revisi</li> <li>- Matriks Anggaran Semula Menjadi</li> <li>- Rencana Kerja Anggaran (RKA)</li> <li>- Nota Dinas Usulan Revisi Penanggung Jawab Kegiatan</li> <li>- Dokumen Hibah</li> <li>- Konsep DIPA</li> <li>- DIPA Sebelum Revisi</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PR.03.01	b. Anggaran Biaya Tambahan (ABT)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.03.02	c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.03.03	d. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
5	PR.04	<b>Penetapan Kinerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Komnas HAM</li> <li>- Sekretaris Jenderal</li> <li>- Kepala Biro</li> <li>- Kepala Bagian</li> <li>- Kepala Subbagian</li> <li>- Pejabat Fungsional</li> <li>- Pejabat Pelaksana</li> <li>- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil/PPPK</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
6	PR.05	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>					
	PR.05.00	a. Evaluasi Kinerja dan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Evaluasi Berkala</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Hibah</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.05.01	b. Survei Kepuasan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Rekomendasi Badan Pusat Statistik</li> <li>- Kuesioner</li> <li>- Laporan Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	<b>PR.06</b> PR.06.00	<b>Penyusunan Laporan Kinerja</b> a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - LKIP Komnas HAM - LKIP Sekretariat Jenderal Komnas HAM - LKIP Biro - Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.06.01	b. Laporan Berkala - Laporan Harian - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Laporan Semesteran - Laporan Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PR.06.02	c. Laporan Insidental	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
<b>II</b>	<b>HM</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>					
1	<b>HM.00</b>	<b>Komunikasi Publik</b> - Pemberitaan Kegiatan Komnas HAM - Jadwal Wawancara - Korespondensi - Hubungan dengan Media/kunjungan wartawan - Konferensi Pers - Press Release - Tanggapan atas Pemberitaan Media Online	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
2	<b>HM.01</b>	<b>Publikasi Elektronik</b> - Monitoring Berita Media Online - Pembuatan <i>Live Streaming</i> - Konten Youtube, Instagram, Twitter dan Lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
3	<b>HM.02</b>	<b>Pengembangan Bakohumas</b> - Seminar/ Bimbingan Teknis - Government Visit	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	HM.03	<b>Keprotokolan</b>					
	HM.03.00	a. Dokumen Penerimaan Tamu Anggota Komnas HAM - Buku Tamu - Daftar alamat	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	HM.03.01	b. Dokumen Laporan Pendampingan Anggota Komnas HAM	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	HM.03.02	c. Penyelenggaraan Acara Kedinasan - Upacara Bendera - Upacara Hari Besar - Upacara Pelantikan - Serah Terima Jabatan - Peresmian	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	HM.03.03	d. Kunjungan - Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri Anggota Komnas HAM - Penerimaan Tamu	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	HM.03.04	e. Agenda Anggota Komnas HAM	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
	HM.03.05	f. Penghargaan dan Tanda Kenang-kenangan - Pemberian Penghargaan - Plakat - Sertifikat - Lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
HM.03.06	g. Ucapan - Ucapan Selamat - Ucapan Terima Kasih - Ucapan Bela Sengkawa - Ucapan Permohonan Maaf - Ucapan Lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama		

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
III	TU	<b>KETATAUSAHAAN</b>					
1	<b>TU.00</b>	<b>Layanan Pimpinan</b> - Dokumen Kegiatan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM dari kunjungan dinas, menghadiri undangan dinas, rapat, dan lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
2	<b>TU.01</b> TU.01.00	<b>Rapat Pimpinan</b> a. Undangan Rapat Pimpinan	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	TU.01.01	b. Bahan Rapat Pimpinan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	TU.01.02	c. Daftar Hadir Rapat Pimpinan	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	TU.01.03	d. Notulensi Rapat Pimpinan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	TU.01.04	e. Berita Acara Rapat pimpinan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
3	<b>TU.02</b> TU.02.00	<b>Rapat Koordinasi</b> a. Undangan Rapat Koordinasi	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	TU.02.01	b. Bahan Rapat Koordinasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	TU.02.02	c. Daftar Hadir Rapat Koordinasi	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komna HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	TU.02.03	d. Notulensi Rapat Koordinasi	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	TU.02.04	e. Berita Acara Rapat Koordinasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
4	TU.03	<b>Penugasan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM</b>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
5	TU.04	<b>Penugasan Sekretaris Jenderal</b>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
6	TU.05	<b>Risalah/Notulensi Rapat lainnya</b>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama	
IV	HK	<b>HUKUM</b>					
1	HK.00	<b>Program Legislasi</b> - Naskah Urgensi - Naskah Akademik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>HK.01</b> HK.01.00	<b>Produk Hukum</b> a. Produk Hukum yang bersifat pengaturan (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum) - Peraturan Komnas HAM dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM - Pedoman - Petunjuk Pelaksanaan - Standar Operasional Prosedur - Instruksi - Surat Edaran - Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.01.01	b. Produk Hukum yang bersifat penetapan (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
		- Keputusan Ketua	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
		- Keputusan Sekretaris Jenderal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
3	<b>HK.02</b> HK.02.00	<b>Dokumentasi Produk Hukum</b> a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.02.01	b. Penyebarluasan Informasi Hukum	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	HK.03 HK.03.00	<b>Telaah Hukum</b> a. Telaah atau Opini Hukum Intern	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.03.01	b. Telaah atau Opini Hukum Eksternal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.03.02	c. Telaah atau Opini Perjanjian : Telaah Kontrak dan Perjanjian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.03.03	d. Telaah atau Opini Akta dan Berita Acara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
5	HK.04	<b>Sosialisasi atau Penyuluhan Produk Hukum</b>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
6	HK.05 HK.05.00	<b>Pemberian Bantuan atau konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan sengketa lainnya)</b> a. Pidana - Surat Kuasa - Surat Permohonan Pra Peradilan - Berkas Perkara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Dakwaan</li> <li>- Eksepsi</li> <li>- Tanggapan Jaksa Atas Eksepsi</li> <li>- Putusan Sela</li> <li>- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum</li> <li>- Penerimaan Pledoi atau Nota Pembelaan Atas Dakwaan yang dibuat oleh Penasehat Hukum/Terdakwa/Kedua-duanya</li> <li>- Replik penasehat hukum terdakwa</li> <li>- Duplik JPU</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri</li> <li>- Memori banding</li> <li>- Putusan Pengadilan Tinggi</li> <li>- Memori Kasasi</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.05.01	b. Perdata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Somasi atau jawaban atas somasi</li> <li>- Gugatan</li> <li>- Jawaban dan Eksepsi atas gugatan</li> <li>- Replik kuasa hukum tergugat</li> <li>- Putusan Sela</li> <li>- Kesimpulan pihak-pihak yang berperkara</li> <li>- Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri</li> <li>- Pernyataan Banding, Akta Banding, memori banding dan kontra memori dan putusan Pengadilan Tinggi</li> <li>- Upaya hukum Kasasi: Pernyataan Kasasi, Akta Pernyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi dan Putusan Mahkamah</li> <li>- <i>Legal Opinion</i> (LO)</li> <li>- <i>Legal Assistance</i> (LA)</li> <li>- Akta Perdamaian</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.05.02	c. Tata Usaha Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat permusyawaratan (<i>dismissal procedure</i>)</li> <li>- Pemeriksaan Persiapan</li> <li>- Ketua Majelis membacakan gugatan</li> <li>- Jawaban dari tergugat</li> <li>- Replik dari penggugat</li> <li>- Duplik dari tergugat</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuktian</li> <li>- Kesimpulan</li> <li>- Putusan</li> <li>- Upaya Hukum (Banding dan/atau Kasasi)</li> <li>- Pelaksanaan Putusan</li> <li>- Ganti Rugi</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	HK.05.03	d. Arbitrase	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
<b>V</b>	<b>KP</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>					
		<b>Bezetting atau Persediaan Pegawai</b>					
1	KP.00		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
2	<b>KP.01</b>  KP.01.00	<b>Formasi Pegawai</b> a. Usulan Unit Kerja  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Usulan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.01.01	b. Usulan Formasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Jabatan</li> <li>- Analisis Beban Kerja (ABK)</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.01.02	c. Usulan permintaan formasi Menteri PAN RB & Kepala BKN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permintaan Formasi</li> <li>- Surat Persetujuan Formasi dari KEMENPANRB</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.01.03	d. Penetapan Formasi ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.01.04	e. Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
<b>3</b>	<b>KP.02</b>	<b>Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>					
	KP.02.00	a. Penerimaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Panitia Seleksi</li> <li>- Pengumuman Formasi Pegawai</li> <li>- Surat Lamaran</li> <li>- Pengumuman hasil ujian (Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang)</li> <li>- Pengumuman kelulusan</li> <li>- Berkas lamaran yang tidak diterima</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.02.01	b. Pengangkatan Calon ASN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)</li> <li>- Surat Keputusan Pengangkatan Calon ASN</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.02.02	c. Orientasi Calon ASN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembekalan Calon ASN</li> <li>- Program Magang Calon ASN di unit kerja</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.02.03	d. Pelatihan Dasar - Persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi - Sertifikat Pelatihan Dasar	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.02.04	e. Pengangkatan ASN - Surat Keterangan Sehat - Sumpah Pengangkatan ASN - Berita Acara Pengangkatan ASN - Surat Keputusan Pengangkatan ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
4	<b>KP.03</b>	<b>Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</b>  - Surat Pengumuman Pengadaan PPPK - Surat Hasil Seleksi - Berkas Lamaran - Pelaksanaan Ujian (SKD dan SKB) - Penetapan Kelulusan (Berkas Hasil Ujian) - Berkas Lamaran yang tidak diterima - Nota Usul Pengangkatan - Surat Keputusan Pengangkatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
5	<b>KP.04</b>	<b>Seleksi Terbuka Jabatan</b>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
6	<b>KP.05</b> KP.05.00	<b>Pembinaan Karir Pegawai</b>  a. Diklat Pegawai, Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, Pelatihan Dasar, Kursus, Magang, Izin Belajar atau Tugas Belajar - Surat Perintah, Surat Tugas, Surat Keputusan, Surat Izin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri - Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan/atau Sertifikat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.05.01	b. Ujian Penyesuaian Ijazah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Soal-soal Ujian Penyesuaian Ijazah</li> <li>- Pengumuman Hasil Ujian</li> <li>- Sertifikat</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.02	c. Ujian Dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Soal-soal Ujian Dinas</li> <li>- Pengumuman Hasil Ujian</li> <li>- Sertifikat</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.03	d. Uji Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil Assesment Pihak Penyelenggara</li> <li>- Pemetaan <i>Talent Mapping</i> Pegawai</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.04	e. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS	Terbuka	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.05	f. Penilaian Kinerja ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.06	g. Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.05.07	h. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.08	i. Pakta Integritas Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.09	j. Pembinaan Mental Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.10	k. Disiplin Pegawai - Daftar Hadir Pegawai - Rekapitulasi Daftar Hadir	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.11	l. Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.05.12	m. Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	KP.06	<b>Perselisihan atau Sengketa Pegawai</b>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
8	<b>KP.07</b> KP.07.00	<b>Mutasi Pegawai</b> a. Mutasi Kerja - Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit Kerja, Mutasi ke Kantor Perwakilan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.07.01	b. Kenaikan Pangkat atau Golongan atau Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.07.02	c. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural - Surat Keputusan - Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.07.03	d. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional - Surat Keputusan - Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.07.04	e. Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.07.05	f. Berkas Tim Penilai Kinerja PNS dan/atau PPPK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
9	<b>KP.08</b> KP.08.00	<b>Pemberian Mandat</b> a. Pelaksana Tugas (Plt)	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.08.01	b. Pelaksana Harian (Plh)	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
10	<b>KP.09</b> KP.09.00	<b>Administrasi Pegawai</b> a. Cuti Pegawai - Cuti Tahunan - Cuti Besar - Cuti Sakit - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting - Cuti Bersama - Cuti di luar Tanggungan Negara	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.09.01	b. Dokumentasi Identitas Pegawai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usul Penetapan Kartu Pegawai</li> <li>- Kartu Pegawai Elektronik</li> <li>- Kartu Suami atau Kartu Istri</li> <li>- Kartu Taspen</li> <li>- Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>- Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan</li> <li>- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)</li> <li>- SPT Tahunan</li> <li>- NPWP</li> <li>- Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.09.02	c. Data Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pegawai</li> <li>- Daftar Urut Kepangkatan (DUK)</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.09.03	d. Pengurusan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.09.04	e. Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
<b>11</b>	<b>KP.10</b> KP.10.00	<b>Kesejahteraan Pegawai</b> a. Kesehatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.10.01	b. Asuransi Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.10.02	c. Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.10.03	d. Tabungan Pensiun	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.10.04	e. Rekreasi atau Kesenian atau Olahraga	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.10.05	f. Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.10.06	g. Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
<b>12</b>	<b>KP.11</b> KP.11.00	<b>Berkas Perseorangan</b> a. Berkas Perseorangan Pimpinan Komnas HAM	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.11.01	b. Berkas Perseorangan Anggota Komnas HAM	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.11.02	c. Berkas Perseorangan Pegawai/ ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KP.11.03	d. Berkas Perseorangan PPNPN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
<b>13</b>	<b>KP.12</b> KP.12.00	<b>Pemberhentian Pegawai</b> a. Dengan Hormat - Atas permintaan sendiri - Bukan atas permintaan sendiri	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum	
	KP.12.01	b. Tidak Dengan Hormat	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	OT	<b>ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>					
1	<b>OT.00</b> OT.00.00	<b>Organisasi</b> a. Analisis Organisasi  - Undangan - Notulensi Rapat - Naskah Urgensi - Rancangan Bagan dan Struktur Organisasi - Rancangan Peraturan SOTK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.00.01	b. Evaluasi organisasi  - Undangan - Notulensi Rapat - Naskah Urgensi - Rancangan Bagan dan Struktur Organisasi - Rancangan Peraturan SOTK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
2	<b>OT.01</b> OT.01.00	<b>Analisis Jabatan</b> a. Analisis Jabatan Struktural  - Undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan Tentang Jabatan Struktural - Formulir analisis jabatan struktural	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.01.01	b. Analisis Jabatan Fungsional  - Undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan Tentang Analisis Jabatan Fungsional - Formulir analisis jabatan struktural	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.01.02	c. Analisis Jabatan Pelaksana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>OT.02</b>	<b>Standar Kompetensi</b>					
	OT.02.00	a. Standar Kompetensi Jabatan Struktural <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural</li> <li>- Formulir standar kompetensi jabatan struktural</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.02.01	b. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional</li> <li>- Formulir standar kompetensi jabatan Fungsional</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.02.02	c. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan, notulensi rapat, hasil wawancara, Peraturan Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
4	<b>OT.03</b>	<b>Analisis Beban Kerja</b>					
	OT.03.00	a. Analisis Beban Kerja Struktural	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.03.01	b. Analisis Beban Kerja Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.03.02	c. Analisis Beban Kerja Pelaksana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>OT.04</b> OT.04.00	<b>Tata Laksana</b> a. Penetapan atau Penyelarasan SOP	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.04.01	b. Tata Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
6	<b>OT.05</b> OT.05.00	<b>Reformasi Birokrasi</b> a. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi (Notulensi Rapat, Undangan Rapat dan dokumen pendukung lainnya): - Manajemen Perubahan - Deregulasi Kebijakan - Penataan dan Penguatan Organisasi - Penataan Tata Laksana - Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur - Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.05.01	b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
7	<b>OT.06</b> OT.06.00	<b>Evaluasi Jabatan</b> a. Evaluasi Jabatan Struktural	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	OT.06.01	b. Evaluasi Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	OT.06.02	c. Evaluasi Jabatan Pelaksana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
<b>VII</b>	<b>PI</b>	<b>PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS</b>					
<b>1</b>	<b>PI.00</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Biasa	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.00.00	a. Analisis Kebutuhan					
	PI.00.01	b. Daftar Barang Dalam Ruangan	Biasa	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.00.02	c. Daftar Penyedia barang dan jasa  (Daftar Rekanan) - legalitas perusahaan - Berkas Penawaran	Biasa	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>2</b>	<b>PI.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.01.00	a. Alat Tulis Kantor - Surat Permintaan Pengadaan - Memorandum Pelaksanaan pengadaan - HPS PPK - Surat Tugas Kepala ULP - Pengadaan barang dan jasa (Jadwal pengadaan, RKS, Dokumen prakualifikasi, Dokumen penawaran harga, Berita acara evaluasi dan negosiasi, Surat Penetapan pemenang) - Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PI.01.01	b. Perlengkapan Kantor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permintaan Pengadaan</li> <li>- Memorandum Pelaksanaan pengadaan</li> <li>- HPS PPK</li> <li>- Surat Tugas Kepala ULP</li> <li>- Pengadaan barang atau jasa (Jadwal pengadaan, RKS, Dokumen prakualifikasi, Dokumen penawaran harga, Berita acara evaluasi dan negosiasi, Surat Penetapan pemenang)</li> <li>- Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian</li> <li>- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.01.02	c. Kendaraan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.01.03	d. Tanah dan Bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.01.04	e. Instalasi atau Jaringan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.01.05	f. Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>3</b>	<b>PI.02</b>	<b>Pengelolaan Barang</b>					
	PI.02.00	a. Penyimpanan Inventaris Kantor (Barang Belanja Modal) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan</li> <li>- Surat Bukti Barang Masuk</li> <li>- Penyimpanan Barang</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.02.01	b. Penyimpanan Barang Persediaan (Barang Habis Pakai) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan</li> <li>- Surat Bukti Barang Masuk</li> <li>- Penyimpanan Barang Habis Pakai</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PI.02.02	c. Distribusi atau Penyaluran Barang Milik Negara (BMN) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat, Memo, Nota Dinas Permintaan Barang</li> <li>- Berita acara serah terima barang</li> <li>- Catatan Keluar Masuk Barang atau ATK</li> <li>- Laporan Realisasi Pemakaian barang atau ATK</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.02.03	d. Distribusi Barang Persediaan (Barang Habis Pakai) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat, Memo, Nota Dinas Permintaan Barang</li> <li>- Formulir Pengambilan Barang</li> <li>- Catatan Keluar Masuk Barang atau ATK</li> <li>- Laporan Realisasi Pemakaian barang atau ATK</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.02.04	e. Inventarisasi BMN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Tim</li> <li>- Berita acara inventarisasi</li> <li>- Daftar inventaris (Buku barang atau Daftar barang lainnya)</li> <li>- Laporan hasil inventarisasi</li> <li>- Daftar barang Ruangan</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.02.05	f. Stock Opname Barang Persediaan atau Barang Habis Pakai	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.02.06	g. Penghapusan BMN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risalah Lelang</li> <li>- Surat Pengajuan Penghapusan</li> <li>- Surat Keputusan tim</li> <li>- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Barang</li> <li>- Surat Keterangan Barang Rusak Berat</li> <li>- Berita Acara Penilaian dan Penelitian</li> <li>- Pengumuman atau Iklan Lelang</li> <li>- Berita Acara Penghapusan BMN</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.02.07	h. Rekonsiliasi BMN	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PI.02.08	i. Pelaporan BMN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kondisi Barang</li> <li>- Laporan Barang Kuasa Pengguna</li> <li>- Berita Acara Rekonsiliasi Ekstern dan Intern</li> <li>- Laporan Persediaan Barang Habis Pakai</li> <li>- Laporan persediaan tidak habis pakai</li> <li>- Laporan Pengelolaan BMN</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	PI.02.09	j. Dokumen Kepemilikan Aset atau kekayaan Komnas HAM	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
4	PI.03	<b>Pemeliharaan atau Perawatan BMN</b>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
VIII	RT	<b>KERUMAHTANGGAAN</b>					
1	RT.00	<b>Tata Ruang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan Tata Ruang atau Gedung atau Kantor</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
2	RT.01	<b>Pengelolaan Kendaraan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAST Kendaraan Dinas</li> <li>- Formulir Peminjaman Kendaraan</li> <li>- Dokumen Kepemilikan Kendaraan (BPKB dan STNK)</li> <li>- Pengurusan Pajak dan Perpanjangan Plat Nomor Kendaraan Dinas</li>   <li>- Dokumen Pemeliharaan Kendaraan (Servis Besar atau Kecil, BBM)</li>   <li>- Pengurusan Kendaraan Hilang dan Masalahnya</li> <li>- Dokumen Pengurusan Kartu Parkir</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	RT.02	<b>Ruang Rapat dan Penyediaan Konsumsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan Agenda Rapat dan Konsumsi</li> <li>- <i>Back up</i> data aplikasi peminjaman ruangan</li> <li>- Dokumen Kerja sama dengan Penyedia Konsumsi</li> <li>- Dokumen Tagihan Konsumsi</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
4	RT.03	<b>Telekomunikasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen yang berkaitan dengan telekomunikasi (data pelanggan, kontrak dan tagihan)</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
5	RT.04	<b>Pengamanan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Nama Satuan Pengamanan</li> <li>- Jadwal Piket</li> <li>- <i>Back up</i> data Kamera Pengawas</li> <li>- Dokumen Data Pengunjung atau Tamu</li> <li>- Berita Acara Pengamanan</li> <li>- Laporan Kehilangan</li> <li>- Laporan Gangguan</li> <li>- Laporan Kerusakan</li> <li>- Laporan Kecelakaan</li> <li>- Ijin Keluar Masuk Orang atau Barang</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
6	RT.05	<b>Listrik dan Air</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Perbaikan Jaringan atau Instalasi Listrik dan Air</li> <li>- Dokumen Pembayaran Tagihan Listrik dan Air</li> <li>- Dokumen Pemasangan Baru Jaringan atau Instalasi Listrik dan Air</li> <li>- BAST Pekerjaan Instalasi Listrik dan Air</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	RT.06	<b>Bangunan</b> - Dokumen <i>Service Charge</i> Gedung - Dokumen Rumah Dinas Pimpinan dan/atau Anggota Komnas HAM	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
8	RT.07	<b>Layanan Perkantoran</b> - Pertamanan dan Penghijauan - Dokumen layanan kebersihan - Dokumen Uang Muka dan SPJ Operasional - Dokumen berkaitan dengan layanan operasional (langganan, perbaikan dan perawatan)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>IX</b>	<b>KU</b>	<b>KEUANGAN</b>					
1	<b>KU.00</b> KU.00.00	<b>Pelaksanaan Anggaran</b> a. Rencana Anggaran Biaya	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.00.01	b. Penggajian	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.00.02	c. Pengeluaran Anggaran	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.00.03	d. Belanja Barang Habis Pakai	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KU.00.04	e. Belanja Barang Inventaris atau Barang Modal - Barang Bergerak atau Barang Inventaris - Tanah dan Bangunan	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.00.05	f. Belanja Jasa	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>2</b>	<b>KU.01</b>	<b>Pengelolaan Perbendaharaan</b>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.01.00	a Perbendaharaan - SK Pengangkatan KPA - SK Pengangkatan PPK - SK Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM - SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.01.01	b. Buku atau Kartu Pengawasan Kredit Anggaran	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.01.02	c. Pajak - Surat Setor Pajak (SSP) - Nota Konfirmasi, dll.	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.01.03	d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) - Pengaturan pencairan dana PNBP	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja	Biro Umum	
	KU.01.04	e. Pengembalian Belanja - Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) - Pengembalian Belanja Pegawai	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KU.01.05	f. Berita Acara Pemeriksaan Kas	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.01.06	g. Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.01.07	h. Pembukuan Anggaran - BKU - BKP - Buku atau Kartu Realisasi Anggaran	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.01.08	i. Keputusan KPA	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>3</b>	<b>KU.02</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan</b>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.02.01	a. Laporan Kas - Kas atau Register Penutupan Kas - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.02.02	b. Laporan Keuangan Tahunan	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>4</b>	<b>KU.03</b>	<b>Pertanggungjawaban Keuangan Negara</b>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.03.00	a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan					



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KU.03.01	b. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara : - Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
5	<b>KU.04</b> KU.04.00	<b>Sistem Akuntansi Instansi (SAI)</b> a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.04.01	b. Laporan Realisasi SAI Bulanan atau Triwulan atau Semester	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
6	<b>KU.05</b> KU.05.00	<b>Ketatausahaan Keuangan</b> a. Keterangan Penghasilan	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.05.01	b. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.05.02	c. Pinjaman	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KU.05.03	d. Iuran Keanggotaan Organisasi	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	KU.06	<b>Bantuan atau Hibah atau Pinjaman Luar Negeri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)</li> <li>- Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>Grey book</i>)</li> <li>- Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya</li> <li>- Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>X</b>	<b>KA</b>	<b>KEARSIPAN</b>					
1	<b>KA.00</b> KA.00.00	<b>Persuratan</b> a. Pengurusan Surat Masuk	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KA.00.01	b. Pengurusan Surat Keluar	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KA.00.02	c. Formulir atau Catatan Permintaan Penomoran Surat	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
2	<b>KA.01</b>	<b>Penyusunan Sistem Kearsipan Dinamis</b>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
3	<b>KA.02</b>	<b>Penataan Arsip Aktif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas)</li> <li>- Laporan Penataan Arsip Aktif</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
4	<b>KA.03</b>	<b>Pengelolaan Arsip Inaktif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar arsip Inaktif</li> <li>- Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KA.04	<b>Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skema Penataan Arsip</li> <li>2) Peta Lokasi Penyimpanan Arsip</li> <li>3) Cheklist pengaturan suhu dan temperatur ruang penyimpanan</li> <li>4) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)</li> </ol>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
6	KA.05	<b>Alih Media Arsip</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Alih Media Arsip</li> <li>- Daftar Arsip yang dialih mediakan</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
7	KA.06	<b>Autentikasi Arsip</b>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
8	KA.07	<b>Akses Penggunaan Arsip</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Peminjaman Arsip</li> <li>- Formulir Peminjaman</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
9	KA.08	<b>Pengelolaan Arsip Vital</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Arsip Vital, dll</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
10	KA.09	<b>Pengelolaan Arsip Terjaga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Arsip Terjaga</li> <li>- Berita Acara Penyerahan salinan otentik Arsip Terjaga, dll</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
11	KA.10 KA.10.00	<b>Penyusutan arsip</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemindahan Arsip <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemindahan</li> <li>- Daftar arsip yang dipindahkan</li> </ul> </li> </ol>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KA.10.01	b. Pemusnahan Arsip <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia Pemusnahan Arsip</li> <li>- Notulen rapat panitia penilai</li> <li>- Rekomendasi atau pertimbangan atau pemusnahan arsip dari ANRI</li> <li>- Surat Keputusan pemusnahan</li> <li>- Berita acara pemusnahan</li> <li>- Daftar arsip yang dimusnahkan</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
	KA.10.02	c. Penyerahan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan panitia penilai</li> <li>- Notulen rapat panitia penilai</li> <li>- Surat pertimbangan panitia penilai</li> <li>- Surat Persetujuan Kepala ANRI</li> <li>- Surat pernyataan pimpinan Komnas HAM bahwa arsip autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan</li> <li>- Keputusan penetapan penyerahan</li> <li>- Berita Acara Penyerahan Arsip</li> <li>- Daftar Arsip Yang Diserahkan</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Umum	
<b>12</b>	<b>KA.11</b> KA.11.00	<b>Pembinaan Kearsipan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan Teknis Kearsipan atau Bimbingan Konsultasi Kearsipan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan,</li> <li>- Persiapan kegiatan,</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan, dan</li> <li>- Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> </li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
	KA.11.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Apresiasi atau sosialisasi atau penyuluhan atau lomba kearsipan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan,</li> <li>- Persiapan kegiatan,</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan, dan</li> <li>- Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> </li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KA.11.02	c. Supervisi atau Pengawasan atau Monitoring atau Evaluasi Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan,</li> <li>- Persiapan kegiatan,</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan, dan</li> <li>- Pelaporan Hasil Supervisi atau Pengawasan atau Monitoring atau Evaluasi Kearsipan</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Umum	
<b>XI</b>	<b>PW</b>	<b>PENGAWASAN</b>					
<b>1</b>	<b>PW.00</b>	<b>Audit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Kinerja</li> <li>- Audit Dengan Tujuan Tertentu</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi	Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	
<b>2</b>	<b>PW.01</b>	<b>Reviu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Laporan Keuangan</li> <li>- Reviu Laporan Kinerja</li> <li>- Reviu Rencana Anggaran</li> <li>- Reviu Revisi Anggaran</li> <li>- Reviu Pengelolaan Anggaran</li> <li>- Reviu Rencana Kegiatan</li> <li>- Reviu Rengendalian Intern</li> <li>- Reviu Lainnya</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	
<b>3</b>	<b>PW.02</b>	<b>Evaluasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi SAKIP</li> <li>- Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> <li>- Evaluasi Lainnya</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	
<b>4</b>	<b>PW.03</b>	<b>Pemantauan Monitoring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Rekomendasi Auditor Intern</li> <li>- Pemantauan Rekomendasi Auditor Ekstern</li> <li>- Pemantauan Rekomendasi Tuntutan Ganti Rugi</li> <li>- Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)</li> <li>- Pemantauan Disiplin Pegawai</li> <li>- Pemantauan Lainnya</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PW.04	<b>Pengaduan dalam Rangka Pengawasan</b> a. Pengaduan Intern b. Pengaduan Ekstern	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	
6	PW.05	<b>Penguatan Pengawasan</b> - Pengendalian Gratifikasi - Penanganan Benturan Kepentingan - Pembangunan Zona Integritas - Pengembangan Aparat Pengendalian Intern Pemerintah - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Laporan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Temuan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan - <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> - Bimbingan Teknis - Konsultasi - Asistensi - Sosialisasi - Kegiatan Pengawasan Lainnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	
7	PW.06	<b>LHKPN Dan LHKASN</b> - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) - Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	
XI	KL	<b>KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA</b>					
1	KL.00	<b>Perjanjian</b> - Naskah MoU atau Nota Kesepahaman - Perjanjian Kerja sama - Telaah atau kajian atau evaluasi dan pertimbangan hukum - Risalah Rapat pembuatan MoU - Rancangan MoU - Rancangan Perjanjian Kerjasama	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KL.01	<b>Perjanjian Internasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU atau Nota Kesepahaman</li> <li>- Telaah atau kajian atau evaluasi dan pertimbangan hukum</li> <li>- Risalah Rapat pembuatan MoU</li> <li>- Rancangan MoU</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
3	KL.02 KL.02.00	<b>Keanggotaan dalam Organisasi Internasional</b> <p>a. GANHRI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Dasar atau Statuta</li> <li>- Rencana Strategis</li> <li>- Deklarasi Hasil Konferensi</li> <li>- Notulen Pertemuan</li> <li>- Rekomendasi Subkomisi Akreditasi</li> <li>- Bahan Rapat, Presentasi Komnas HAM</li> <li>- Laporan <i>Historical Note</i></li> <li>- Dasar Hukum Keanggotaan</li> <li>- Iuran Keanggotaan</li> <li>- Naskah Urgensi</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
	KL.02.01	<p>b. <i>Asia Pacific Forum (APF)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Dasar/ Konstitusi</li> <li>- Rencana Strategis</li> <li>- Hasil Konferensi</li> <li>- Notulen Pertemuan</li> <li>- Rekomendasi Subkomisi Akreditasi</li> <li>- Bahan Rapat, Presentasi Komnas HAM</li> <li>- Laporan <i>Historical Note</i></li> <li>- Dasar Hukum Keanggotaan</li> <li>- Iuran Keanggotaan</li> <li>- Naskah Urgensi</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
	KL.02.02	<p>c. <i>South East Asia National Forum (SEANF)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Dasar/ <i>Rules of Procedur</i></li> <li>- Rencana Strategis</li> <li>- Hasil Konferensi</li> <li>- Notulen Pertemuan</li> <li>- Rekomendasi Subkomisi Akreditasi</li> <li>- Bahan Rapat, Presentasi Komnas HAM</li> <li>- <i>Historical Note</i></li> <li>- Dasar Hukum Keanggotaan</li> <li>- Iuran Keanggotaan</li> <li>- Naskah Urgensi</li> <li>- Sekretariat Permanen</li> </ul>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KL.02.03	d. Organisasi Internasional Lainnya	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
4	KL.03	<b>Jejaring Komnas HAM</b>	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
<b>XIII</b>	<b>KT</b>	<b>KEPUSTAKAAN</b>					
1	KT.00	<b>Keanggotaan</b>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
2	KT.01	<b>Penambahan Koleksi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompilasi Data Penerbit</li> <li>- Hasil Seleksi Data</li> <li>- Hasil Pengumpulan Data Baru</li> <li>- Usulan dan Persetujuan Penambahan Koleksi</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
3	KT.02	<b>Pengelolaan Bahan Pustaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku induk koleksi</li> <li>- Daftar buku terseleksi</li> <li>- Daftar buku dalam pemesanan</li> <li>- Daftar buku dalam permintaan</li> <li>- Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah</li> <li>- Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus</li> <li>- Lembar kerja pengolahan BP (Boram, Pengkatalogan)</li> <li>- <i>Shelt List</i> / Jajaran Kartu utama (<i>master list</i>)</li> <li>- Daftar tambahan Buku (<i>Assesion list</i>)</li> <li>- Daftar/jajaran kendali (Subyek dan Pengarang)</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
4	KT.03	<b>Layanan Informasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengunjung</li> <li>- Layanan Rujukan</li> <li>- Layanan Peminjaman</li> <li>- Layanan Silang Layang (<i>interloan library</i>)</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KT.04	<b>Pemeliharaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alih Media</li> <li>- Fumigasi</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
XIV	TK	<b>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>					
1	TK.00	<b>Dokumentasi Arsitektur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Informasi</li> <li>- Sistem Aplikasi</li> <li>- Infrastruktur</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
2	TK.01	<b>Dokumentasi Implementasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Informasi</li> <li>- Sistem Aplikasi</li> <li>- Infrastruktur</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
3	TK.02	<b>Perekaman dan Pemuktahiran Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Isian</li> <li>- Daftar Petugas Perekaman</li> <li>- Jadwal Pelaksanaan</li> <li>- Laporan hasil perekaman dan pemuktahiran data</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
4.	TK.03	<b>Migrasi Sistem Aplikasi dan Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Migrasi</li> <li>- Pelaksanaan Migrasi</li> <li>- Berita Acara Kegiatan Migrasi</li> <li>- Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi</li> <li>- Laporan hasil migrasi</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
5	TK.04	<b>Hosting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permintaan <i>hosting</i></li> <li>- Laporan hasil uji kelayakan</li> <li>- Laporan pelaksanaan <i>hosting</i></li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
6	TK.05	<b>Keamanan Data</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Backup Data</li> <li>b. Anti Virus</li> <li>c. Firewall</li> </ol>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SUBSTANTIF</b>							
<b>I.</b>	<b>PP</b>	<b>PENKAJIAN DAN PENELITIAN</b>					
<b>1</b>	<b>PP.00</b> PP.00.00	<b>Pengkajian dan Penelitian</b> a. Pengkajian dan Penelitian Instrumen HAM Internasional - Rancangan Proposal Penelitian - Diskusi Terfokus Proposal Penelitian - Masukan dan Konsultasi Publik - Pengesahan Proposal Penelitian - Studi Kepustakaan - Wawancara mendalam dengan narasumber - Diskusi Terfokus dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) - Hasil Kajian dan Penelitian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
	PP.00.01	b. Pengkajian dan Penelitian Peraturan Perundang-undangan - Rancangan Proposal Penelitian - Diskusi Terfokus Proposal Penelitian - Masukan dan Konsultasi Publik - Pengesahan Proposal Penelitian - Studi Kepustakaan - Wawancara mendalam dengan narasumber - Diskusi Terfokus dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) - Hasil Kajian dan Penelitian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
	PP.00.02	c. Rekomendasi/ <i>Policy Brief</i> Hasil Pengkajian dan Penelitian - Termasuk penilaian kepatuhan rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
	PP.00.03	d. Studi Kepustakaan, Studi Lapangan dan Studi Banding di negara lain mengenai HAM	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
	PP.00.04	c. Pengkajian dan Penelitian Situasi HAM - Rancangan Proposal Penelitian - Diskusi Terfokus Proposal Penelitian - Masukan dan Konsultasi Publik - Pengesahan Proposal Penelitian - Studi kepustakaan - Wawancara mendalam dengan narasumber - Diskusi Terfokus dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) - Hasil Kajian dan Penelitian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PP.00.05	f. Kerjasama Pengkajian dan Penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya baik tingkat nasional maupun internasional dalam bidang HAM - Termasuk Pengembangan atau jejaring peneliti dan kerjasama penelitian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
<b>II.</b>	<b>PH</b>	<b>PENYULUHAN HAM</b>					
<b>1</b>	<b>PH.00</b> PH.00.00	<b>Pendidikan dan Pelatihan HAM</b> a. Manual Pendidikan dan Pelatihan - Kurikulum pelatihan - Silabus - Modul - Panduan - Bahan ajar/materi	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
	PH.00.01	b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM 1) Rencana Pelatihan: - Surat Undangan rapat perencanaan pelatihan - Rapat, Daftar Hadir Rapat, Notulensi	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		2) Narasumber dan Peserta Pelatihan HAM - Surat permohonan narasumber - Surat Undangan narasumber - Materi (bahan ajar, <i>curriculum vitae</i> , NPWP, KTP) - Surat Undangan Peserta	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		3) Pelaksanaan Pelatihan - Daftar Hadir - Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan - laporan pelaksanaan Pelatihan - Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		4) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		5) Laporan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		6) Data Base Peserta Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PH.00.02	c. Pelatihan Dasar HAM / Dasar HAM Lanjutan/ <i>Training of Traineeer</i> 1) Rencana Pelatihan: - Surat Undangan rapat perencanaan pelatihan - Rapat, Daftar Hadir Rapat, Notulensi	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		2) Narasumber dan Peserta Pelatihan HAM : - Surat permohonan narasumber - Surat Undangan narasumber - Materi (bahan ajar, <i>curriculum vitae</i> , NPWP, KTP) - Surat Undangan Peserta	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		3) Pelaksanaan Pelatihan - Daftar Hadir - Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan - laporan pelaksanaan Pelatihan - Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		4) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		5) Laporan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		6) Data Base Peserta Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
2	PH.01 PH.01.00	<b>Penyuluhan HAM</b> a. Diseminasi HAM ( Seminar, FGD, Workshop, Bimtek, Festival, Hari HAM) - Bahan dan metodologi - Laporan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		PH.01.01	b. Penyelenggaraan Penyuluhan HAM 1) Rencana Penyuluhan HAM - Surat Undangan rapat perencanaan penyuluhan - Rapat, Daftar Hadir Rapat, Notulensi	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	
	2) Narasumber dan Peserta Penyuluhan HAM : - Surat permohonan narasumber - Surat Undangan narasumber - Materi (bahan ajar, <i>curriculum vitae</i> , NPWP, KTP) - Surat Undangan Peserta		Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Pelaksanaan Penyuluhan - Daftar Hadir - Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan - laporan pelaksanaan Penyuluhan - Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		4) Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		5) Laporan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		6) Data Base Peserta	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
<b>3</b>	<b>PH.02</b> PH.02.00	<b>Publikasi HAM</b> a. Media Cetak 1) Rencana Publikasi - Rapat Redaksi (Mengidentifikasi isu dan penanggungjawab masing-masing rubrik)	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		2) Pengumpulan Bahan - Tulisan dari internal dan kontribusi dari unit-unit pelaksana fungsi	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		3) Pembuatan Sarana Publikasi - Tulisan yang telah diedit dari Internal dan Kontribusi dari Unit-Unit Pelaksana Fungsi	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		4) Pra-Cetak ( <i>Layout dan Dummy</i> ) untuk publikasi dalam bentuk cetak	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		5) Produksi Cetak	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PH.02.01	b. Media Digital (info grafis, video grafis, film pendek, berita melalui website, Online Jurnal System/OJS) 1) Rencana Publikasi - Rapat rencana pembuatan infografis, videografis, film pendek, Online Jurnal System/OJS 2) Pengumpulan Bahan - Infografis, videografis, film pendek : gambar/ilustrasi, foto, - Berita Website : Hasil liputan (Reportase, Foto) - OJS : Tulisan dari Para Pihak 3) Pembuatan Sarana Publikasi - Infografis, videografis, film pendek : gambar/ilustrasi, foto, - Berita website : tulisan yang telah diedit - OJS : Tulisan dari para pihak yang telah diedit	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		2) Pengumpulan Bahan - Infografis, videografis, film pendek : gambar/ilustrasi, foto, - Berita Website : Hasil liputan (Reportase, Foto) - OJS : Tulisan dari Para Pihak	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
		3) Pembuatan Sarana Publikasi - Infografis, videografis, film pendek : gambar/ilustrasi, foto, - Berita website : tulisan yang telah diedit - OJS : Tulisan dari para pihak yang telah diedit	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
4	PH.03	<b>Pengembangan Penyuluhan/ Jejaring HAM</b>	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Pemajuan HAM	
III	PL	<b>PELAYANAN PENGADUAN</b>					
1	PL.00 PL.00.00	<b>Administrasi Penerimaan Berkas Pengaduan</b> a. Daftar Penomoran Berkas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PL.00.01	b. Berkas Pengaduan: - Surat Pengaduan - Identitas Pengadu - Kronologi Kasus - Bukti Pendukung - Lembar Disposisi	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PL.00.02	c. Distribusi Berkas Pengaduan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PL.01 PL.01.00	<b>Pengembangan Pelayanan Prima</b> a. Pengaduan Pro-Aktif /Responsif - Term of References (TOR) - Surat Tugas - Dokumentasi - Surat Undangan - Rekaman Video dan Audio - Laporan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PL.01.01	b. Pembangunan Jejaring Pengaduan - Term of References (TOR) - Surat Tugas - Dokumentasi - Surat Undangan - Rekaman Video dan Audio - Laporan - Dokumen Kerjasama	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PL.01.02	c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan - Term of References (TOR) - Surat Tugas - Laporan - Surat Undangan	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PL.01.03	d. Data Base Pengembangan Layanan Prima Pengaduan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
3	<b>PL.02</b>	<b>Evaluasi Pelayanan Pengaduan</b> - Term of References (TOR) - Surat Tugas - Laporan - Surat Undangan	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
4	<b>PL.03</b>	<b>Pengelolaan Berkas Pengaduan</b> - Rekapitulasi Data Pengaduan - Formulir Peminjaman Berkas - <i>Stock Opname</i> - Laporan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>PM</b>	<b>PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN</b>					
<b>1</b>	<b>PM.00</b>	<b>Pemantauan dan Penanganan Kasus</b>					
	PM.00.01	a. Penerimaan dan penanganan kasus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar Disposisi</li> <li>- Berkas Kasus</li> <li>- Penelaahan/Analisis Kasus</li> <li>- Barang/alat bukti</li> <li>- Tanda Terima PIC</li> <li>- Berita Acara Penanganan</li> <li>- <i>Resume</i></li> <li>- Surat Klarifikasi</li> <li>- Surat Pemanggilan</li> <li>- Draft Rekomendasi</li> <li>- <u>Surat Rekomendasi</u></li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PM.00.02	b. Pemantauan Lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOR</li> <li>- Surat Permintaan Pertemuan</li> <li>- Laporan Hasil Pemantauan Lapangan</li> <li>- Surat Rekomendasi</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PM.00.03	c. <i>Ekspose</i> Kasus	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PM.00.04	d. Pemberian Pendapat di Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permintaan</li> <li>- Surat Permohonan</li> <li>- Surat Persetujuan Ketua Pengadilan</li> <li>- Pendapat HAM</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
<b>2</b>	<b>PM.01</b>	<b>Mandat Pengawasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis</b>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	PM.01.00	a. Pemantauan dan Penilaian Kebijakan Pemerintah					
	PM.01.01	b. Pencarian Fakta dan Penilaian Tindakan					
	PM.01.02	c. Pemberian Rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah DPR dan DPRD					



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PM.02	<b>Penyelidikan dan Pemeriksaan Peristiwa yang patut diduga pelanggaran HAM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi</li> <li>- Laporan</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	
4	PM.03	<b>Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Tim</li> <li>- Surat Perintah dimulainya Penyelidikan</li> <li>- TOR</li> <li>- Rencana Kegiatan</li> <li>- Surat Tugas</li> <li>- Surat Pemanggilan</li> <li>- Surat tanda terima Pemanggilan</li> <li>- Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>- Alat Bukti</li> <li>- Laporan</li> <li>- Surat Penyampaian Laporan ke Jaksa Agung dan DPR</li> <li>- Surat Permohonan Keterangan Korban</li> <li>- Kronologi kejadian atau peristiwa</li> <li>- Surat Verifikasi Korban</li> <li>- Surat Keterangan Korban</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Dukungan Penegakan HAM	
5	PM.04	<b>Penanganan Isu atau Peristiwa Strategis Hasil Putusan Sidang Paripurna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Tim</li> <li>- Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>- Surat Tugas</li> <li>- Surat Pemanggilan</li> <li>- Surat tanda terima Pemanggilan</li> <li>- TOR</li> <li>- Rencana Kegiatan</li> <li>- Alat Bukti</li> <li>- Laporan</li> <li>- Kronologi kejadian atau peristiwa</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Dukungan Penegakan HAM	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V</b>	<b>MD.</b>	<b>MEDIASI</b>					
<b>1</b>	<b>MD.00</b> MD.00.00	<b>Penanganan Kasus</b> a. Proses Penanganan kasus - Berkas Kasus - Lembar Disposisi - Penelaahan atau Analisis Kasus - Alat bukti - Tanda Terima PIC - Berita Acara Penanganan - Resume - Surat Penanganan Kasus - Surat Rekomendasi - Surat Konsultasi - Indikator Penanganan Kasus - Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM (Sifat Kerahasiaan Mediasi)	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	MD.00.01	b. Hasil Mediasi - Kesepakatan Mediasi - Penilaian Ahli - Berita Acara (Pertemuan, Mediasi, Penundaan Mediasi, Pasca Mediasi) - Pendaftaran kesepakatan mediasi ke Pengadilan Negeri - <i>Fiat</i> Eksekusi ke Pengadilan Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM (Sifat Kerahasiaan Mediasi)	Biro Dukungan Penegakan HAM	
	MD.00.02	c. Pasca Mediasi - Berita Acara Pasca Mediasi - Laporan Kegiatan Pasca Mediasi - Surat Undangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM (Sifat Kerahasiaan Mediasi)	Biro Dukungan Penegakan HAM	
<b>VI</b>	<b>PS</b>	<b>PERSIDANGAN</b>					
<b>1</b>	<b>PS.00</b> PS.00.00	<b>Sidang Paripurna</b> a. Undangan Sidang Paripurna	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.00.01	b. Bahan Rapat Sidang Paripurna	Terbatas	Eselon II	Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PS.00.02	c. Daftar Hadir Sidang Paripurna	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.00.03	d. Notulensi Sidang Paripurna	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.00.04	e. Keputusan Sidang Paripurna	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak Memiliki Dampak yang Mengganggu Kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
<b>2</b>	<b>PS.01</b> PS.01.00	<b>Rapat Dewan Etik</b> a. Undangan Rapat Dewan Etik	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
	PS.01.01	b. Bahan Rapat Dewan Etik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
	PS.01.02	c. Daftar Hadir Rapat Dewan Etik	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PS.01.03	d. Notulensi Rapat Dewan Etik	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
	PS.01.04	e. Keputusan Rapat Dewan Etik	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
<b>3</b>	<b>PS.02</b> PS.02.00	<b>Rapat Subkomisi</b> a. Undangan Rapat Subkomisi	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
	PS.02.01	b. Bahan Rapat Subkomisi	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
	PS.02.02	c. Daftar Hadir Rapat Subkomisi	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PS.02.03	d. Notulensi Rapat Subkomisi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	
4	<b>PS.03</b> PS.03.00	<b>Forum Internasional</b> a. Undangan Forum Internasional	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.03.01	b. Bahan Forum Internasional	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.03.02	c. Daftar Hadir Forum Internasional	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.03.03	d. Notulensi Forum Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	

NO.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>PS.04</b>	<b>Rapat Kerja Anggota Komnas HAM</b>					
	PS.04.00	a. Undangan Rapat Kerja Anggota Komnas HAM	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.04.01	b. Bahan Rapat Kerja Anggota Komnas HAM	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.04.02	c. Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Komnas HAM	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.04.03	d. Keputusan Rapat Kerja Anggota Komnas HAM	Biasa atau Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	
	PS.04.04	e. Notulensi dan Keputusan Rapat Kerja Anggota Komnas HAM	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama	

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AHMAD TAUFAN DAMANIK